

EFEKTIVITAS DAN EFESIENSI BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DI BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA

Yermias Wambrauw¹, Manuel A. Todingbua², Corvis L Rantererung³

Universities Kristen Indonesia Paulus

Coressponding author: verrywambrauw.nbx@gmail.com;
manuel_august@ukipaulus.ac.id; corvis@ukipaulus.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Efektivitas dan Efisiensi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Obyek penelitian ini di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua sumber yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini mulai dari kegiatan Survei, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Informan penelitian ini sebanyak 10 orang pegawai di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya. Metode analisis pada penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Tahap analisis data pada penelitian ini mulai dari: Reduksi Data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas belanja langsung dan tidak langsung di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya harus dilihat secara holistik karena keduanya saling berkaitan dan membutuhkan pengelolaan terintegrasi untuk mendukung pembangunan daerah secara optimal. Efisiensi penggunaan anggaran menjadi kunci utama dalam memenuhi amanat Permendagri, sehingga strategi pengelolaan yang tepat dapat mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan anggaran demi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga mengungkap berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi belanja daerah, seperti kualitas SDM, transparansi, akuntabilitas, dukungan teknologi informasi, kebijakan pusat, partisipasi masyarakat, ketersediaan data, serta kapabilitas tim anggaran. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan menentukan keberhasilan pengelolaan belanja daerah secara efisien dan berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas, Efisiensi, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung

ABSTRACT

This research aims to Effectiveness and Efficiency of Direct Spending and Indirect Spending at the Regional Revenue, Financial and Asset Management Agency of Intan Jaya Regency. This study uses a qualitative descriptive method. The object of this research is at the Regional Revenue, Financial and Asset Management Agency of Intan Jaya Regency. The data sources in this study consist of two sources, namely primary data and secondary data. The data collection methods in this study started from Survey, Observation, Interview and Documentation activities. The informants of this study are 10 employees at the Regional Revenue, Financial and Asset Management Agency of Intan Jaya Regency. The analysis method in this study uses qualitative descriptive analysis. The stages of data analysis in this study start from: Data Reduction, Data Presentation and Drawing Conclusions. The results of the study show that the effectiveness of direct and indirect spending at the Regional Revenue, Financial Management, and Assets Agency of Intan Jaya Regency must be viewed holistically because the two are interrelated and require integrated management to support optimal regional development. Efficiency in the use of the budget is the main key in fulfilling the mandate of the Minister of Home Affairs, so that the right management strategy can optimize budget allocation and utilization for the welfare of the community. This research also reveals various factors that affect the effectiveness and efficiency of regional spending, such as the quality of human resources, transparency, accountability, information technology support, central policies, community participation, data availability, and the capabilities of the budget team. These factors are interrelated and determine the success of managing regional expenditures efficiently and sustainably.

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Direct Expenditures, Indirect Expenditures*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah. Di Indonesia, anggaran daerah dibagi menjadi dua kategori utama: belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung biasanya digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, belanja tidak langsung mencakup pengeluaran untuk administrasi, pengelolaan, dan kegiatan pendukung lainnya yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kabupaten Intan Jaya, sebagai daerah yang sedang berkembang, dihadapkan pada tantangan besar dalam pengelolaan anggaran. Dengan berbagai kebutuhan pembangunan yang mendesak, penggunaan anggaran yang tepat dan efisien sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Namun, sering kali terdapat permasalahan dalam pengelolaan belanja, seperti alokasi anggaran yang tidak tepat, kurangnya transparansi, dan rendahnya akuntabilitas dalam penggunaan dana.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya, fokus penelitian pada Efektivitas dan Efisiensi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung di Badan Pendapatan. Menurut Beni (2016) dalam Krisdayanti (2021), efektivitas adalah hubungan kinerja dengan tujuan, ukuran seberapa baik tingkat kinerja, kebijakan, dan prosedur organisasi tercapai. Efektivitas juga terkait dengan tingkat keberhasilan operasi sektor publik dan dikatakan bermanfaat ketika kegiatan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan untuk memberikan pelayanan publik. Ronal (2022), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Pengertian efektivitas di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ristanti (2023), pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai.

Menurut Mardiasmo (2016) dalam Yulitiawati (2021), efektivitas merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam pencapaian tujuannya. Ukuran efisiensi dapat dikembangkan dengan menghubungkan antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya standar yang telah ditetapkan sebelumnya (misalnya anggaran). Dari definisi tersebut, maka Efisiensi adalah berbanding antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*) Martini (2019). Hidayat (2020) yang dimuat dalam blog situsn www.pendidikanekonomi.com menyebutkan Istilah "belanja" pada umumnya hanya digunakan di sektor publik, tidak di sektor bisnis. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran.

Menurut Permendagri Nomor.59 Tahun 2007 pengeluaran atau belanja pemerintah daerah kabupaten/kota untuk keperluan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dari penjabaran kebijakan instan dengan pemanfaatan sumber daya yang disediakan untuk kegiatan yang disesuaikan dengan misi

organisasi. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan (Anggraeni & Saleh, 2020). Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja langsung adalah suatu pengeluaran yang dianggarkan secara langsung terkait dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan. Dalam konteks ini, penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi belanja langsung dan belanja tidak langsung menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa efektif dan efisien pengelolaan belanja di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya, serta untuk memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi belanja, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Fenomena yang dijumpai peneliti pada obyek penelitian ini terkait Efektivitas dan Efisiensi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Kabupaten Intan Jaya sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan belanja secara efektif dan efisien. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan pengelolaan anggaran yang tidak optimal.
2. Tingginya Kebutuhan Pembangunan: Dengan berbagai kebutuhan pembangunan yang mendesak, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, penting untuk menganalisis bagaimana belanja daerah dialokasikan. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan antara belanja langsung yang berdampak langsung pada masyarakat dan belanja tidak langsung yang mendukung operasional pemerintah.
3. Persepsi Masyarakat: Masyarakat Kabupaten Intan Jaya sering kali menunjukkan ketidakpuasan terhadap pelayanan publik yang diberikan. Fenomena ini mencerminkan bahwa belanja yang dilakukan mungkin tidak seefektif yang diharapkan. Pertanyaan tentang apakah belanja langsung dan tidak langsung benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi penting untuk dijawab.
4. Audit dan Evaluasi Kinerja: Laporan hasil audit yang mengungkapkan adanya ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran dapat menjadi fenomena yang signifikan. Temuan audit yang menunjukkan pemborosan atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
5. Pengaruh Kebijakan Pusat: Perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang sering terjadi dapat memengaruhi alokasi dan pengelolaan anggaran di daerah. Ini menciptakan tantangan bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menentukan prioritas belanja dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif.
6. Penerapan Teknologi Informasi: Fenomena penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan potensi untuk meningkatkan efisiensi. Penggunaan sistem informasi keuangan yang baik dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan belanja, namun masih ada tantangan dalam hal implementasi dan pelatihan pegawai.
7. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan: Fenomena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran menunjukkan adanya keinginan untuk partisipasi yang lebih besar dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan efektivitas belanja.

Berbagai fenomena yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya menunjukkan perlunya analisis mendalam tentang efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Masyarakat sering kali mempertanyakan apakah belanja yang dilakukan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah telah sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, laporan hasil audit yang menunjukkan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Efektivitas dan Efisiensi Belanja Lansung dan Belanja Tidak Lansung di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Obyek penelitian ini di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua sumber yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini mulai dari kegiatan Survei, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Informan penelitian ini sebanyak 10 orang pegawai di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya. Metode analisis pada penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Tahap analisis data pada penelitian ini mulai dari:

1. Reduksi data adalah proses menyaring dan menyederhanakan data mentah agar fokus pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi atau tabel tematik untuk mempermudah identifikasi pola dan hubungan antar informasi.
3. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah disajikan, kemudian diverifikasi secara berkelanjutan agar hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi peneliti pada obyek penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan finansial yang menghambat efektivitas belanja, serta tingginya kebutuhan pembangunan yang memerlukan analisis cermat dalam alokasi anggaran. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas belanja, sementara temuan audit yang mengungkapkan ketidakefektifan penggunaan anggaran dapat merusak kepercayaan publik. Selain itu, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dan penerapan teknologi informasi memberikan tantangan dan peluang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran juga menunjukkan potensi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas belanja dan pelayanan publik. Kemudian peneliti melakukan wawancara untuk melakukan analisis selanjutnya. Melalui wawancara, peneliti dapat mengeksplorasi persepsi, sikap, dan keyakinan responden terhadap isu tertentu, membantu memahami latar belakang dan konteks pemikiran mereka. Pada penelitian ini informan ditetapkan sebanyak 10 orang pegawai yang mengetahui tentang Belanja Lansung dan Belanja Tidak Lansung di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya.

1. Efektivitas Belanja Lansung Dan Belanja Tidak Lansung Di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, yang mengatur pengeluaran atau belanja pemerintah daerah untuk keperluan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, analisis mengenai efektivitas belanja langsung dan tidak langsung di Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya sangat relevan. Belanja Langsung dan Dampaknya. Belanja langsung sering kali lebih mudah diukur dampaknya karena secara langsung terkait dengan pelayanan publik. Misalnya, program-program yang dibiayai melalui belanja langsung dapat terlihat hasilnya dari peningkatan infrastruktur dan layanan dasar yang dirasakan oleh masyarakat Ferdinandus (2024). Hal ini sejalan dengan tujuan Permendagri yang menekankan pentingnya pengeluaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tantangan Belanja Tidak Langsung seperti pengelolaan administrasi, terkadang sulit diukur efektivitasnya. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam menilai kontribusi belanja tidak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang diamanatkan oleh Permendagri. Indikator Kinerja pada Efektivitas belanja langsung dapat diukur melalui pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator ini penting untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran mencapai hasil yang diinginkan, serta untuk memastikan bahwa belanja daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Umpan Balik Masyarakat dilakukan dengan melihat Program-program yang dibiayai oleh belanja langsung sering kali mendapatkan umpan balik langsung dari masyarakat, yang membantu dalam menilai keberhasilan dan efektivitasnya. Umpan balik ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan program ke depan. Meskipun sulit diukur, belanja tidak langsung dapat berkontribusi terhadap efektivitas belanja langsung dengan menyediakan dukungan administratif yang diperlukan. Pengelolaan yang baik dalam belanja tidak langsung akan memastikan bahwa belanja langsung dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Efektivitas belanja daerah sangat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Permendagri menekankan pentingnya hal ini untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Keberhasilan program-program pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui belanja langsung dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa belanja langsung memiliki dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Namun, belanja tidak langsung yang tidak terencana dengan baik dapat mengganggu efektivitas program-program lainnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perencanaan yang matang agar semua jenis belanja dapat saling mendukung.

Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan belanja diperlukan untuk memastikan efektivitasnya (Smith et al., 2025). Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik, di mana setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan dievaluasi. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan belanja dapat meningkatkan efektivitas dari kedua jenis belanja. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dapat lebih memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga pengelolaan anggaran menjadi lebih responsif dan akuntabel. Efektivitas belanja langsung dan tidak langsung di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya harus dilihat secara holistik. Kedua jenis belanja saling berkaitan dan memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang diamanatkan oleh Permendagri. Upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi juga sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.

2. Efisien Penggunaan Anggaran Untuk Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, yang mengatur pengeluaran atau belanja pemerintah daerah untuk pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, efisiensi penggunaan anggaran di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya menjadi aspek yang sangat penting (Nomor, 59AD). Efisiensi ini dapat diukur dari seberapa baik anggaran yang dialokasikan dapat mencapai hasil yang diinginkan, sehingga menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat dari hasil yang dicapai terhadap alokasi yang dilakukan Wahyuningsih (2022). Pengeluaran yang tepat guna akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam anggaran. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran dapat memberikan kemudahan dan mempercepat proses

pelaporan serta pengawasan. Dengan sistem informasi yang baik, data anggaran dapat diakses secara real-time, membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Pembandingan antara biaya dan manfaat dari setiap program yang dibiayai merupakan langkah penting untuk menilai efisiensi anggaran. Melalui analisis ini, pemerintah dapat mengidentifikasi program yang memberikan hasil optimal dan yang perlu diperbaiki atau dihentikan.

Kebijakan pengelolaan anggaran yang ketat dan transparan sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi Lathifah (2024). Dengan adanya regulasi yang jelas, penggunaan anggaran dapat lebih terarah dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih akurat. Pelatihan bagi pegawai dalam pengelolaan anggaran juga menjadi faktor yang sangat penting. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, efisiensi penggunaan dana dapat ditingkatkan, dan kesalahan dalam pengelolaan anggaran dapat diminimalisir. Efisiensi belanja langsung sering kali berkaitan dengan pengurangan pemborosan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan melakukan pengadaan secara transparan dan kompetitif, pemerintah daerah dapat menghemat anggaran dan mendapatkan barang dan jasa berkualitas. Melakukan evaluasi penggunaan anggaran secara berkala sangat penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan efisiensi. Evaluasi ini dapat memberikan wawasan tentang kinerja program dan memberikan dasar untuk perbaikan di masa depan. Pengelolaan belanja tidak langsung yang baik dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi keseluruhan. Dukungan administratif yang efisien akan membantu program-program belanja langsung berjalan lebih lancar. Kerjasama antara berbagai instansi dalam pengelolaan anggaran dapat meningkatkan efisiensi. Sinergi antarinstansi akan menciptakan pengelolaan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran dapat mendorong efisiensi dan akuntabilitas. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan warganya, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip-prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran, baik untuk belanja langsung maupun tidak langsung, merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang diamanatkan dalam Permendagri. Dengan langkah-langkah yang strategis, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

3. Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi belanja daerah di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya

Pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi belanja daerah di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya mencakup berbagai aspek yang saling terkait Faadhillah (2024). Berikut adalah analisis mengenai Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi belanja daerah di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya, sebagai tersebut:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Pegawai yang terlatih, memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan anggaran, serta keterampilan analitis yang baik akan lebih mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program dengan baik. Pelatihan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan menjadi penting untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

b. Transparansi dan Akuntabilitas.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran, serta ada pertanggungjawaban yang jelas dari pemerintah, maka efektivitas

dan efisiensi belanja daerah akan meningkat. Kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk pengelolaan keuangan yang baik.

c. Dukungan Teknologi Informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan anggaran dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan akurasi data. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan pengawasan anggaran secara real-time, memudahkan analisis data, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dengan teknologi yang tepat, pengelolaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih efisien.

d. Kebijakan Pemerintah Pusat

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat memiliki dampak langsung pada alokasi dan penggunaan anggaran daerah. Kebijakan yang fleksibel dan mendukung otonomi daerah dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu ketat atau tidak relevan dapat menghambat efektivitas belanja daerah.

e. Tingkat Partisipasi Masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan belanja daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Partisipasi masyarakat membantu pemerintah memahami kebutuhan dan prioritas warga, serta memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap program-program yang dijalankan. Masyarakat yang terlibat aktif akan lebih mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran.

f. Ketersediaan Data dan Informasi.

Data dan informasi yang akurat sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Tanpa data yang valid, pengelola anggaran akan kesulitan dalam merencanakan dan mengevaluasi program. Oleh karena itu, sistem pengumpulan dan pengolahan data yang baik harus dibangun agar pengambilan keputusan dapat didasarkan pada informasi yang akurat dan relevan.

g. Pengalaman dan Kapabilitas Tim Pengelola Anggaran

Pengalaman tim pengelola anggaran memainkan peran penting dalam efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Tim yang memiliki pengalaman dalam mengelola anggaran akan lebih memahami tantangan yang ada, serta mampu merumuskan solusi yang tepat. Kapabilitas tim dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pembelajaran dari praktik terbaik.

Komunikasi yang baik antara instansi pemerintah dan stakeholder terkait sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan strategi pengelolaan anggaran. Koordinasi yang efektif akan mengurangi duplikasi usaha dan memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara optimal. Dinamika politik lokal dapat mempengaruhi alokasi anggaran secara signifikan. Kebijakan yang diambil sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, yang dapat mengganggu perencanaan dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, penting untuk menjaga stabilitas politik dan menciptakan konsensus dalam pengelolaan anggaran. Kondisi ekonomi daerah berpengaruh langsung terhadap pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan yang rendah akan membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan belanja dan investasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti melalui optimalisasi pajak dan retribusi, harus menjadi bagian dari perencanaan anggaran. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya dipengaruhi oleh banyak faktor. Memahami dan mengelola faktor-faktor tersebut dengan baik akan membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Efektivitas belanja langsung dan tidak langsung di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya harus dipandang secara holistik, mengingat kedua jenis belanja tersebut saling berkaitan dan memerlukan pengelolaan yang baik untuk

mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan oleh Permendagri. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Efisiensi dalam penggunaan anggaran, baik untuk belanja langsung maupun tidak langsung, merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang diamanatkan dalam Permendagri. Dengan pengelolaan yang tepat dan langkah-langkah strategis, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya dapat mengoptimalkan alokasi dan penggunaan anggaran, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi belanja daerah di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya, sebagai tersebut: kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan, transparansi dan akuntabilitas, dukungan teknologi informasi, kebijakan pemerintah pusat, tingkat partisipasi masyarakat, ketersediaan data dan informasi dan pengalaman dan kapabilitas tim pengelola anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Ferina, & Saleh, Suji Abdullah. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 36–44.
- Faadhillah, Alif Luthfi, & Akbar, Bahrullah. (2024). *Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Ferdinandus, Sherly. (2024). Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon. *Equilibrium: Journal Of Economics And Development Studies*, 1(2), 88–97.
- Hidayat, Abdul. (2020). *Analisis Efektivitas Belanja Pegawai Sebelum Dan Sesudah Penerapan Uu No. 23 Tahun 2014 Serta Dampaknya Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tahun 2015-2018)*. Universitas Siliwangi.
- Krisdayanti, Wike. (2021). Pemanfaatan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Bpjs Kesehatan Di Kota Medan. *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1–111.
- Lathifah, Hilma, Frinaldi, Aldri, Asnil, Asnil, & Putri, Nora Eka. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 585–592.
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *Perpajakan—Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Martini, Rita, Lianto, Naufal, Hartati, Sukmini, Zulkifli, Zulkifli, & Widyastuti, Endah. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Nomor, Peraturan Menteri Dalam Negeri. (59ad). Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jakarta: Cv. Logo Mas Dwi Karya*.
- Pekei, Beni. (2016). *Konsep Dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Penerbit Taushia.
- Ristanti, Dwi Mei Riya. (2023). Pengaruh Efektivitas Penggunaan Aplikasi Mobile Dalam Meningkatkan Efisiensi Pengiriman Barang Pada Perusahaan Ace Hardware Sidoarjo. *Yos Soedarso Economic Journal (Yej)*, 5(3), 97–113.
- Ronal, Marinus. (2022). Analisis Produktivitas Pada Ud. Fika Jaya Kabupaten Tana Toraja.

- Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 2(2), 176–190.
- Smith, Muhammad Rizki, Pratama, Inka Nusamuda, Silmi, Hayatus, Winardi, Lalu Deri, Nurwahyuningsih, Nurwahyuningsih, Marwah, Marwah, Pratama, Wahyu, Alam, Nabil, Saputra, Ajay, & Surya, Lalu Dicky. (2025). Evaluasi Peran Anggaran Pendapatan Belanja Negara Dalam Mendukung Program Stunting Dan Ketahanan Pangan Di Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 4(9), 9–22.
- Wahyuningsih, Sri, Azizah, Siti Nur, Wahyungningtyas, Novie, & Harun, Harun. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Ditinjau Dari Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Desa X Periode 2017-2018. *Jurnal E-Bis*, 6(1), 89–98.
- Yulitiawati, Yulitiawati, & Rusmidarti, Rusmidarti. (2021). Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten Oku. *Jetap*, 1(2), 91–109.